

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penyediaan Rusunawa sebagai pemenuhan hak layak huni di Rusunawa Kaligawe secara umum telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki tempat tinggal layak maupun yang direlokasi dari permukiman ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan Rusunawa merupakan bentuk pemenuhan hak layak huni, sedangkan berkurangnya permukiman ilegal dan kawasan kumuh merupakan dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

Ditinjau dari aspek *content of policy*, isi kebijakan telah mengarah pada kepentingan pemenuhan hak layak huni bagi kelompok sasaran. Namun, derajat perubahan yang diharapkan pemerintah belum sepenuhnya tercapai karena implementasi kebijakan tidak hanya menuntut perpindahan masyarakat ke Rusunawa, tetapi juga perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan hunian agar tetap layak dan tidak berkembang menjadi lingkungan yang menyerupai permukiman kumuh.

Sementara itu, dari aspek *context of implementation*, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh strategi pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan Rusunawa serta dinamika kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Tantangan yang masih dihadapi meliputi proses relokasi yang

memerlukan adaptasi sosial, fungsi Rusunawa sebagai hunian sementara yang belum berjalan optimal, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang belum diimbangi dengan ketersediaan unit, serta pentingnya transparansi dalam proses seleksi penghuni. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penyediaan Rusunawa perlu diperkuat tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pengelolaan yang transparan, pembinaan penghuni, serta strategi keberlanjutan agar tujuan pemenuhan hak layak huni dapat tercapai secara optimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kota Semarang perlu melakukan pembaruan regulasi terkait pengelolaan rusunawa agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Aturan yang lebih jelas, terutama mengenai batas masa tinggal dan kriteria penghuni, penting untuk memastikan bahwa rusunawa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, proses pengawasan juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Di sisi lain, pengelolaan rusunawa perlu didukung dengan peningkatan sumber daya, baik dari segi petugas, fasilitas, maupun perawatan bangunan. Pemerintah juga perlu lebih aktif dalam melakukan pembinaan kepada penghuni, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan tertib, agar lingkungan rusunawa tetap layak huni dan tidak kembali menjadi kawasan dengan kualitas rendah.

Selain itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan sekitar Rusunawa Kaligawe, seperti masalah banjir yang masih sering terjadi. Upaya penanganan lingkungan ini penting agar kenyamanan dan aksesibilitas penghuni tidak terganggu. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan rusunawa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pencegahan kawasan permukiman kumuh.